



## Refleksi Pribadi Pancasila Dalam Membentuk Karakter, Moral Dan Prilaku Warga Negara

**I Gede Wisnu Sugiarta<sup>1</sup>, Muhammad Satrio<sup>2</sup>, Pandu Pramudya Prawira<sup>3</sup>**

Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail: [wisnusugiarta46@gmail.com](mailto:wisnusugiarta46@gmail.com)<sup>1</sup>, [striomhmd532@gmail.com](mailto:striomhmd532@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[pandupramudyaprawira@gmail.com](mailto:pandupramudyaprawira@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract.** *Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays an essential role in shaping the character, morality, and behavior of its citizens. The values contained in each of Pancasila's five principles serve not only as a guide for national and state life but can also be applied in daily activities. This paper describes real-life experiences in practicing Pancasila's values through simple actions that reflect faith in God, humanity, unity, democracy, and social justice. Through personal reflection, it is understood that the application of Pancasila can begin with small acts such as respecting differences, helping others, deliberating in decision making, and caring for the social environment. Thus, Pancasila is not merely an abstract ideology but a practical and relevant way of life that fosters a peaceful, just, and civilized society.*

**Keywords:** *Pancasila, personal experience, life values, tolerance, social justice.*

**Abstrak.** Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan perilaku warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Tulisan ini menggambarkan pengalaman nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan sederhana yang mencerminkan keimanan kepada Tuhan, rasa kemanusiaan, semangat persatuan, sikap demokratis, dan keadilan sosial. Melalui refleksi pribadi, diperoleh pemahaman bahwa penerapan Pancasila dapat dimulai dari hal kecil seperti menghormati perbedaan, membantu sesama, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi abstrak, tetapi pedoman hidup yang nyata dan relevan dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban.

**Kata Kunci:** Pancasila, pengalaman pribadi, nilai-nilai kehidupan, toleransi, keadilan sosial.

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sekaligus ideologi yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>. Sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila telah menjadi fondasi moral, sosial, dan politik dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima silanya Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

<sup>1</sup> Zainal Arifin, *Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Studi Nilai dan Implementasinya* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2020).

merupakan prinsip universal yang menuntun perilaku warga negara agar senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan<sup>2</sup>.

Dalam konteks kehidupan modern, Pancasila seringkali hanya diingat sebagai simbol kenegaraan atau pelajaran formal di sekolah<sup>3</sup>. Padahal, hakikat sebenarnya dari Pancasila adalah sebagai falsafah hidup (way of life) yang seharusnya dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat luas. Ketika nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan, maka akan terbentuk masyarakat yang harmonis, saling menghormati, serta berkeadilan sosial.

Sayangnya, arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini telah membawa berbagai tantangan baru yang menguji eksistensi nilai-nilai Pancasila. Fenomena seperti individualisme, intoleransi, konsumerisme, serta menurunnya semangat gotong royong menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat mulai menjauh dari semangat Pancasila. Oleh karena itu, menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.

Penerapan Pancasila dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga sopan santun dalam berbicara, menghormati perbedaan keyakinan, menolong tetangga yang membutuhkan, berpartisipasi dalam musyawarah warga, atau berlaku adil dalam lingkungan kerja. Tindakan-tindakan kecil ini jika dilakukan secara konsisten akan menciptakan dampak besar bagi keharmonisan sosial dan stabilitas nasional. Pancasila bukan hanya teori moral, melainkan panduan hidup yang membentuk karakter bangsa yang religius, berperikemanusiaan, dan berkeadaban. Melalui tulisan ini, penulis berusaha merefleksikan pengalaman pribadi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tidak harus dilakukan dalam konteks besar seperti pemerintahan atau kebijakan publik, tetapi juga dapat diwujudkan dalam rutinitas sederhana yang mencerminkan sikap saling menghormati, gotong royong, dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat menyadari bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Secara empiris, pengamalan Pancasila tercermin dalam berbagai tindakan kecil yang menunjukkan kepedulian, gotong royong, dan toleransi. Nilai-nilai seperti menghormati orang lain, membantu sesama, serta mengutamakan musyawarah merupakan bentuk konkret dari kesadaran moral dan sosial yang berakar pada Pancasila. Dalam konteks normatif, nilai-nilai tersebut memiliki dasar hukum dan moral yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital menimbulkan perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Fenomena individualisme, materialisme, serta melemahnya solidaritas sosial menjadi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila di masa

---

<sup>2</sup> Budi Nugroho, *Pancasila Sebagai Landasan Kehidupan Bermasyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>3</sup> Ahmad Hidayat, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Masyarakat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

kini harus diadaptasi agar relevan dengan kondisi modern tanpa kehilangan esensi moral dan spiritualnya. Seperti dikemukakan oleh Soekarno, Pancasila adalah philosophische grondslag atau dasar filsafat bangsa yang harus dihidupkan dalam tindakan nyata<sup>4</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi empiris dan normatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dipilih karena Pancasila tidak hanya merupakan ideologi dan pedoman normatif, tetapi juga terealisasi dalam praktik sosial yang dapat diamati secara empiris.

### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah landasan hukum, prinsip, dan teori terkait Pancasila. Penelitian ini meninjau dokumen resmi, literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau mengatur implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk UUD 1945 dan penjelasan terkait Pancasila sebagai dasar negara, Buku teks, artikel ilmiah, dan publikasi terkait nilai-nilai Pancasila. Studi kasus penerapan Pancasila di lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan komunitas masyarakat. Analisis normatif bertujuan untuk memahami konteks teoretis dan hukum penerapan nilai Pancasila, sehingga setiap pengamatan empiris dapat dievaluasi berdasarkan standar moral, sosial, dan hukum yang berlaku<sup>5</sup>.

### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati praktik nyata pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini dilakukan melalui Observasi langsung, Peneliti mengamati interaksi sosial di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat, termasuk kegiatan gotong royong, musyawarah warga, serta sikap toleransi antarumat beragama. Wawancara mendalam: Peneliti mewawancara individu, tokoh masyarakat, guru, dan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman konkret penerapan Pancasila. Refleksi pribadi: Peneliti mencatat pengalaman pribadi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, misalnya sikap adil, toleransi, dan kepedulian sosial. Data empiris dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada makna tindakan sehari-hari dan hubungan antara pengalaman nyata dengan prinsip Pancasila<sup>6</sup>.

### **3. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui kombinasi: Analisis naratif untuk menafsirkan pengalaman individu dan kelompok dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Analisis komparatif antara hasil observasi empiris dengan ketentuan normatif atau standar ideal. Triangulasi data dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dokumen) untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan<sup>7</sup>.

### **4. Lokasi dan Subjek Penelitian**

<sup>4</sup> Soekarno, *Lahirnya Pancasila* (Jakarta: BPUPKI Press, 1945), hlm. 7.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ahmad Hidayat, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Masyarakat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>7</sup> Dewi Yuliana, "Praktik Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Refleksi dari Komunitas Lokal," *Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2020): 33–46.

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi, antara lain Lingkungan keluarga dan tetangga, Sekolah atau kampus sebagai pusat pendidikan karakter, Komunitas sosial atau organisasi masyarakat yang menerapkan kegiatan gotong royong dan toleransi. Subjek penelitian meliputi warga, mahasiswa, guru, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman nyata dalam menerapkan nilai Pancasila.

#### 5. Tujuan Metode

Dengan kombinasi metode empiris dan normatif, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memahami kerangka normatif Pancasila sebagai pedoman moral dan hukum.
- b. Mengidentifikasi praktik nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menemukan faktor pendukung dan penghambat pengamalan nilai Pancasila di masyarakat modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Refleksi Pribadi terhadap Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari**

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan karakter warga negara yang ideal<sup>8</sup>. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter<sup>9</sup>. Dengan demikian, refleksi personal terhadap Pancasila menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter kebangsaan.

### **Peran Dan Penerapann Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Karakter Warga Negara yang Berintegritas dan Bertanggung Jawab**

Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman moral dan dasar pembentukan karakter warga negara. Nilai-nilai Pancasila mendorong individu untuk membangun integritas, menjunjung kejujuran, menghormati martabat manusia, serta bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai warga negara. Tujuan utama dari Pendidikan ini Adalah untuk membina peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa, bertanggung jawab, dan cinta tanah air<sup>10</sup>.

Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sarana Mengikat Bangsa pada Zaman Generasi Milenial mengangkat beberapa aspek penting:

1. memiliki relevansi yang besar dalam menanggapi tantangan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Generasi Milenial. Konsep Bhinneka Tunggal Ika juga menekankan pentingnya kesetaraan dan pengakuan hak-hak setiap individu, yang menjadi landasan bagi masyarakat yang adil dan inklusif.

---

<sup>8</sup> Zainudin Hasan, Pancasila dan Kewarganegaraan, (Cilacap: CV.Alinia Edumedia, 2025), hlm. 1.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 4.

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2015. Panduan Umum Pendidikan Kewarganegaraan,(Jakarta: Dikti) hlm. 13.

2. Demokrasi dan Partisipasi Publik: Pancasila menempatkan demokrasi sebagai nilai yang fundamental. Dalam konteks Generasi Milenial, penerapan nilai-nilai demokrasi tidak hanya terbatas pada proses politik formal, tetapi juga melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, advokasi isu-isu sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan: Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar bagi pendidikan karakter yang mempromosikan sikap toleransi, kerja sama, dan menghargai keberagaman. Sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional yang mempersatukan bangsa.
4. Toleransi dan Dialog Antaragama/Budaya: Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, nilai-nilai toleransi dan dialog antaragama/budaya menjadi kunci untuk menjaga kerukunan dan harmoni. Generasi Milenial diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memperkuat hubungan antarumat beragama dan suku di Indonesia.
5. Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Berbasis Nilai: Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan tanggung jawab sosial, dapat menjadi dorongan bagi Generasi Milenial untuk terlibat dalam inovasi sosial dan kewirausahaan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6. Penguatan Identitas Nasional di Era Globalisasi: Di tengah arus globalisasi yang mempengaruhi budaya dan nilai-nilai lokal, penerapan nilai-nilai Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi kunci untuk memperkuat identitas nasional yang kuat dan mandiri, sambil tetap terbuka terhadap kerja sama internasional<sup>11</sup>.

### **Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Pembentukan Moral Warga Negara dalam Menghadapi Perkembangan Sosial, Budaya, dan Teknologi**

Perubahan zaman menuntut adanya pedoman moral yang kuat agar warga negara tidak terbawa arus negatif globalisasi dan perkembangan teknologi. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan warga negara agar tetap menjunjung etika sosial, perilaku humanis, serta toleransi dalam era digital. Pancasila juga mengarahkan warga negara untuk menggunakan teknologi secara bijaksana, menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa<sup>12</sup>.

### **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membentuk Perilaku Warga Negara yang Sesuai Etika, Norma, dan Prinsip Berbangsa dan Bernegara**

1. Implementasi Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegravea  
Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung nilai spiritual dan etis yang menjadi fondasi kehidupan bernegravea. Nilai ini bersifat transcendental dan moral, bukan hanya sebagai kepercayaan teologis, tetapi juga menjiwai arah kebijakan, hukum, dan etika penyelenggaraan negara.

---

<sup>11</sup> Zainudin Hasan, Auliya Dhiya Labibah, Nurico Mareza Kelana, Chantika Kurnia Putri, "Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sarana Mengikat Bangsa pada Zaman Generasi Milenial", *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2 (2024): 296.

<sup>12</sup> Keren Mawar Eliza, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tiansati, Zainudin Hasan, "Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi", *Jurnal Hukum dan Bangsa*, Vol. 3 No. 2 (2024): 341-350. 13

Implementasi nilai Ketuhanan berarti bahwa negara Indonesia berdiri di atas fondasi religiusitas yang inklusif, serta menjamin kebebasan dan kesetaraan seluruh pemeluk agama dan kepercayaan dalam kehidupan publik<sup>13</sup>. Implementasi dalam Konstitusi dan Perundang-undangan antara lain, yaitu:

a. Konstitusi Negara

Nilai Ketuhanan secara eksplisit diatur dalam: (1) Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: "...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa..." (2) Pasal 29 ayat (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." (3) Pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing..." Ketentuan ini menjadi kerangka hukum utama yang mendasari regulasi dan kebijakan negara di bidang keagamaan.

b. Perundang-undangan

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22
- 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 ayat (1)
- 3) UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan Agama Pencegahan
- 4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengakui aliran kepercayaan. Semua peraturan tersebut mempertegas bahwa agama dan nilai Ketuhanan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kebijakan negara.

Implementasi dalam lembaga dan sistem Pemerintahan diantaranya:

a) Kementerian Agama

Menyediakan layanan Kementerian ini secara khusus bertugas: (1) kebebasan beragama dan beribadah; (2) Menjamin administrasi keagamaan; (3) Menfasilitasi pendidikan agama; (4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Untuk: (1) Mendorong dialog antaragama; (2) Menyelesaikan FKUB dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota potensi konflik keagamaan; (3) Memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah.

c) Majelis-majelis Agama

Seperti MUL, PGL KWL, WALUBI, PHDI, Matakin, dan MLKI, yang difasilitasi negara sebagai representasi komunitas keagamaan Nilai Ketuhanan juga hadir dalam peringatan hari besar agama sebagai hari libur nasional, doa lintas agama dalam kegiatan resmi negara, pemberdayaan lembaga zakat, rumah ibadah, dan organisasi sosial keagamaan, serta pelestarian budaya religius lokal, seperti nyadran, selamatan, atau tradisi maulid. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan diakui sebagai bagian dari budaya nasional yang memperkuat integrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kehadiran Tuhan dalam negara, tetapi juga menjadi sumber moral dan spiritual bagi terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis, sesuai dengan visi luhur Pancasila.

Untuk memperkuat implementasi nilai Ketuhanan: Pertama, Pendidikan agama yang moderat dan inklusif sejak dini. Kedua, Pelatihan wawasan

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 67

kebangsaan berbasis Pancasila bagi ASN, guru, tokoh agama. Ketiga, Penguanan dialog antar iman dan kerja sama lintas agama. Keempat, Reformasi kebijakan agar inklusif terhadap semua pemeluk agama dan kepercayaan<sup>14</sup>.

## 2. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pengantar: Hakikat Nilai Kemanusiaan dalam Pancasila Sila kedua dari Pancasila berbunyi: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menegaskan bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nilai dan hak yang melekat sejak lahir. Sila ini menjadi dasar bagi pembangunan tatanan sosial-politik yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pancasila tidak mengakui sistem yang menindas, diskriminatif, atau merendahkan manusia atas dasar ras, agama, suku, atau kelas sosial tertentu. Nilai kemanusiaan menjadi penghubung antara nilai Ketuhanan (sila pertama) dan nilai persatuan (sila ketiga), karena memperlakukan manusia secara adil adalah bagian dari ketakwaan, dan syarat terwujudnya keharmonisan sosial<sup>15</sup>.

Konsep kemanusiaan tidak hanya muncul dari pandangan modern tentang hak asasi manusia, melainkan juga (1) Ajaran Konfusianisme yang menekankan ren (cinta kasih, memiliki akar dalam filsafat Timur dan Nusantara, antara lain: empati). (2) Ajaran Hindu-Buddha tentang ahimsa (anti-kekerasan) dan karuna (belas kasih). (3) Tradisi Islam tentang lokal seperti tepo seliro (tenggang rasa, Jawa), siri' na pacce (Bugis-rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). (4) Kebudayaan Makassar), dan pi'il pesenggiri (Lampung). Dalam konteks Indonesia, semua warisan ini bertemu dan dijahit menjadi nilai Juhur yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut filsafat Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk monopluralis, yaitu: makhluk individu dan sosial, makhluk berakal dan berperasaan, serta makhluk spiritual dan material. Maka pengakuan terhadap nilai kemanusiaan bukan hanya dalam bentuk formal, tetapi menyentuh seluruh dimensi manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Ini selaras dengan pandangan Soekarno: "Pancasila itu bukan hanya politik, tetapi juga nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan dalam segenap seginya. Tidak ada Pancasila kalau tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>16</sup>.

Nilai kemanusiaan bersifat universal karena berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, agama, suku, bahasa, dan status sosial. Namun, Pancasila juga mengajarkan bahwa kemanusiaan harus dimaknai secara kontekstual, yaitu berdasarkan budaya luhur bangsa, dilaksanakan sesuai realitas sosial Indonesia, serta tidak lepas dari nilai Ketuhanan dan gotong royong. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam Pancasila tidak identik dengan liberalisme individualistik, tetapi mendasarkan kemanusiaan pada nilai spiritual dan kebersamaan.

## 3. Implementasi Nilai Sila Ketiga

Berbangsa dan bernegara tidak hanya berupa slogan atau Implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan retorika kebangsaan, tetapi harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan publik, sikap warga negara, dan orientasi kelembagaan negara. Sila Ketiga adalah nilai praksis yang mewajibkan kita untuk terus memelihara integrasi nasional, memperkuat solidaritas sosial, serta

<sup>14</sup> Ibid. Hlm, 67-69.

<sup>15</sup> 5 Ibid. Hlm, 69-70.

<sup>16</sup> Soekarno. 1995. Pidato Lahirnya Pancasila, 1Juni 1945, dalam Risalahsidang BPUPKI, hlm. 17.

mencegah disintegrasi bangsa. Salah satu bentuk utama implementasi sila ketiga adalah melalui pendidikan karakter kebangsaan dan pendidikan multikultural. Kurikulum pendidikan harus menanamkan semangat persatuan, cinta tanah air, toleransi, dan saling menghargai dalam keberagaman. Pendidikan tidak boleh menjadi alat penyeragaman, melainkan menjadi wahana untuk membangun kesadaran kolektif akan kebinekaan sebagai kekayaan bangsa. Menurut Tilaar, pendidikan multikultural yang berbasis pada Pancasila dapat menjadi pilar integrasi bangsa dan penghalau benih-benih intoleransi<sup>17</sup>.

Implementasi nilai persatuan juga ditunjukkan dalam pembentukan sistem politik yang inklusif dan demokratis, yang memberi ruang bagi partisipasi semua kelompok, terutama kelompok minoritas. Sistem politik yang eksklusif justru memicu ketidakpuasan, konflik horisontal, dan memudarnya kepercayaan terhadap negara. Pemerintah pusat dan daerah juga harus menciptakan kebijakan yang berpihak pada pemerataan pembangunan antarwilayah, menghindar kecemburuhan antar daerah, dan menjaga solidaritas antarkelompok etnis dan agama. Kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia menyimpan nilai-nilai luhur yang mendukung persatuan, seperti gotong.

#### 4. Implementasi Nilai Sila Keempat dalam Kehidupan Berbangsa

Sila keempat Pancasila mengandung prinsip utama demokrasi Indonesia, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme yang adil, bermoral, dan berdasarkan musyawarah serta perwakilan. Implementasi nilai-nilai sila keempat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan aspirasi rakyat. Implementasi nilai sila keempat tidak cukup hanya melalui pemilu atau formalitas sistem pemerintahan, melainkan harus menjiwai seluruh praktik sosial-politik bangsa Indonesia, dari tingkat pusat hingga desa, dari parlemen hingga keluarga. Implementasi Nilai Sila Keempat dalam sistem politik dan pemerintahan antara lain, yaitu:

- a. Pemilu yang Jujur, Adil, dan Bermakna: Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk implementasi sila keempat, karena di situlah rakyat menggunakan hak politiknya secara langsung. Namun, pemilu harus diiringi dengan pendidikan politik yang sehat, penolakan terhadap politik uang, dan pemilihan berdasarkan visi dan integritas calon, bukan semata popularitas. Menurut Jimly Asshiddiqie, keberhasilan demokrasi perwakilan sangat ditentukan oleh integritas proses pemilu dan kualitas pemilih<sup>18</sup>.
- b. Lembaga Perwakilan yang Berfungsi Optimal: DPR, DPD, dan DPRD harus benar-benar menjalankan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan dengan hikmat kebijaksanaan dan keberpihakan kepada rakyat. Kemudian Wakil rakyat harus secara aktif melakukan dialog dengan konstituen, menyerap aspirasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
- c. Kepemimpinan yang Bijaksana dan Partisipatif: Pemimpin negara dan daerah harus menunjukkan etika kebijaksanaan: jujur, adil, terbuka terhadap masukan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintahan yang

---

<sup>17</sup> H.A.R. Tilaar. 2004, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo), hlm. 112.

<sup>18</sup> Veisa Najwa, Rizka Ayu and Najwa Mufidah Hasibuan, 2023, Integrasi Konsep Hukum Adat Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Banten, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Hal. 8

berorientasi sila keempat selalu membuka ruang partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan.

- d. Implementasi Sila Kelima dalam Kehidupan Berbangsa
  - 1) Bidang Ekonomi
    - a) Kebijakan redistribusi tanah (reforma agraria),
    - b) Dukungan terhadap UMKM dan koperasi
    - c) Pajak progresif untuk mengurangi kesenjangan
    - d) Pengembangan ekonomi daerah tertinggal.
  - 2) Bidang Pendidikan dan Kesehatan
    - a) Akses pendidikan gratis yang merata
    - b) Pembangunan sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),
    - c) Program BPJS Kesehatan dan subsidi untuk masyarakat miskin.
  - 3) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - a) Penegakan hukum tanpa tebang pilih
    - b) Perlindungan hukum bagi masyarakat adat, buruh, dan Perempuan
    - c) Reformasi sistem peradilan agar tidak bias kelas sosial.
  - 4) Bidang Sosial dan Kesejahteraan
    - a) Bantuan sosial yang tepat sasaran (PKH, BLT)
    - b) Pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi
    - c) Kebijakan afirmatif bagi kelompok minoritas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Refleksi Pribadi Pancasila dalam Membentuk Karakter, Moral, dan Perilaku Warga Negara, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk jati diri warga negara Indonesia.

Refleksi terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi proses penting yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi tersebut, warga negara dapat memahami makna ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sebagai pedoman moral dan etika hidup. Nilai-nilai Pancasila juga terbukti berpengaruh besar dalam membentuk karakter berintegritas, bertanggung jawab, serta bermoral baik. Setiap sila memberikan dasar pengembangan karakter yang relevan untuk menghadapi dinamika kehidupan sosial, budaya, dan teknologi yang semakin kompleks.

Di era digital yang penuh tantangan, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan warga negara agar tetap bijaksana dalam bertindak, berperilaku etis, dan menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terlihat dari perilaku toleran, sikap menghormati perbedaan, kemampuan bermusyawarah, dan kepatuhan terhadap aturan. Penerapan itu menjadi indikator keberhasilan Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam perilaku sehari-hari bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan berkeadaban. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi negara, melainkan pedoman hidup yang harus terus diinternalisasi

agar dapat membentuk warga negara yang berkarakter mulia, bermoral tinggi, dan berperilaku sesuai dengan norma serta prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Zainal Arifin, Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Studi Nilai dan Implementasinya (Jakarta: Pustaka Nasional, 2020).
- Budi Nugroho, Pancasila Sebagai Landasan Kehidupan Bermasyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Ahmad Hidayat, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Masyarakat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). Soekarno, Lahirnya Pancasila (Jakarta: BPUPKI Press, 1945), hlm. 7.
- Zainal Arifin, Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Studi Nilai dan Implementasinya (Jakarta: Pustaka Nasional, 2020).
- Ahmad Hidayat, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Masyarakat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Dewi Yuliana, “Praktik Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Refleksi dari Komunitas Lokal,” Jurnal Ilmu Sosial 4, no. 3 (2020): 33–46.
- Zainudin Hasan, Pancasila dan Kewarganegaraan, (Cilacap: CV. Alinia Edumedia, 2025).
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2015. Panduan Umum Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Dikti) hlm. 13.
- Soekarno. 1995. Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, dalam Risalah Sidang BPUPKI, hlm. 17.
- H.A.R. Tilaar. 2004. Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo), hlm. 112.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm. 218.
- Keren Mawar Eliza, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tiansat, Zainudin Hasan, “Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi”, Jurnal Hukum dan Bangsa, Vol. 3 No. 2 (2024): 341-350.
- Zainudin Hasan, Auliya Dhiya Labibah, Nurico Mareza Kelana, Chantika Kurnia Putri, “Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sarana Mengikat Bangsa pada Zaman Generasi Milenial”, Journal of Accounting Law Communication and Technology , Vol. 1 No. 2 (2024): 296.